

ABSTRAK

Organisasi masyarakat adalah organisasi yang di bentuk secara sukarela oleh masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan. Dan organisasi ini merupakan organisasi yang mandiri tanpa adanya intervensi dan ketergantungan dari pemerintah. Akan tetapi dalam UU No. 17 tahun 2013 pasal 40 menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pemberdayaan pada organisasi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah ikut campur dalam kegiatan organisasi masyarakat. Hal ini menjadi menarik untuk di teliti sebab organisasi masyarakat bebas dari campur tangan dari siapapun baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini di lakukan untuk memaparkan bagaimana sifat kemandirian yang ada pada organisasi masyarakat dan menjelaskan apakah pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada organisasi masyarakat dapat di kategorikan sebagai bentuk intervensi ataukah tidak.

Metode penelitian yang di gunakan adalah Normatif. Adapun pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan perundang undangan (The Statute Approach) serta pendekatan konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa organisasi masyarakat memiliki sifat kemandirian yang tidak dapat di lakukan intervensi dari pihak manapun termasuk negara, kecuali dalam hal terkait dengan ideologi dan kedaulatan negara. pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah kepada organisasi masyarakat, Meskipun secara tersurat tidak menunjukkan intervensi tetapi bila di lihat secara tersirat pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah termasuk dalam intervensi samar.

Kata kunci : organisasi masyarakat – intervensi- pemberdayaan

ABSTRACT

Community organizations are organizations that are formed voluntarily by the community without expecting profit. And this organization is an independent organization without any intervention and dependence from the government. However, in Law No. 17 of 2013, article 40 explains that the government empowers community organizations. This indicates that the government intervenes in the activities of community organizations. This is interesting to study because community organizations are free from interference from anyone, both from the private sector and the government. Therefore, this study was conducted to explain the nature of independence in community organizations and to explain whether the empowerment carried out by the government in community organizations can be categorized as a form of intervention or not.

The research method used is Normative. The approaches used are the statutory approach (The Statute Approach) and the legal concept approach (Analytical & Conceptual Approach). The results of this study indicate that community organizations have an independent nature whose existence cannot be intervened by any party including the state, except in matters related to the ideology and sovereignty of the state. empowerment carried out by the government to community organizations. Although it does not explicitly indicate intervention, if viewed implicitly, the empowerment carried out by the government is included in the hidden intervention.

Keywords: *community organization - intervention - empowerment*